

# ANALISIS DAMPAK VARIABEL *TREASURY* TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI SULSEL PERIODE 2017 s.d. 2021

TRI\_ERA (Tim Riset ERA KPPN Palopo)

Ikhwan Mahmud  
Mohammad Djamhuri  
Pijar Lintang Alit  
Nurridha Deanti  
Dimas Bobby Kusumo

## Abstract

*The poverty rate is still amongst the biggest problem to achieve national goals. The government through fiscal policy pays great attention to dealing with the problem. The objective of this study is to analyze the impact of fiscal policy through treasury variable proxies, or variables that are directly or indirectly related to the functions of DGT as a treasury institution in Indonesia. The variables are State Budget Expenditures, KUR, and UMi. The study uses panel data, which is a combination of cross-sectional data in 24 regencies/cities in South Sulawesi and time-series data from 2017 to 2021. The regression method used is the Random Effect Model (REM), also known as the Error Component Model (ECM). The results showed that all treasury variables are statistically significant to give a positive impact on reducing poverty levels in South Sulawesi.*

## Abstrak

Tingkat kemiskinan merupakan persoalan yang masih menjadi tantangan terbesar dalam pencapaian tujuan bernegara. Pemerintah melalui berbagai bauran kebijakan fiskal memberikan perhatian besar dalam penanganan masalah kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak kebijakan fiskal melalui proksi variabel *treasury*, atau variabel yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan fungsi DJPb selaku institusi *treasury* di Indonesia. Variabel dimaksud adalah Belanja APBN, KUR, dan UMi. Penelitian menggunakan data panel dengan total 120 observasi, dari gabungan *data cross section* di 24 kab/kota di Sulsel dan *data time series* tahun 2017 s.d. 2021. Metode regresi yang digunakan adalah *Random Effect Model (REM)* yang dikenal juga sebagai *Error Component Model (ECM)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel *treasury* signifikan secara statistik memberikan dampak positif bagi penurunan tingkat kemiskinan di Sulsel.

**Keywords:** Poverty, APBN, KUR, UMi, IPM

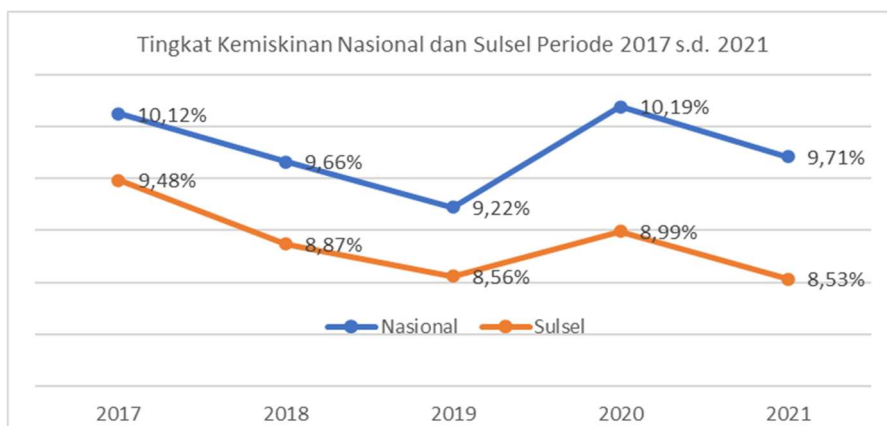
**JEL Classification:** H300, O23, R100

## 1. PENDAHULUAN

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah disebutkan salah satu tujuan bernegara yakni memajukan kesejahteraan umum. Salah satu indikator kesejahteraan umum yang paling mudah didefinisikan adalah tingkat kemiskinan pada periode tertentu, baik di daerah maupun secara nasional.

Target tingkat kemiskinan setiap tahun ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang tentang APBN. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, target tingkat kemiskinan secara nasional pada range 9,2% s.d. 9,7%.

Grafik 1



Sumber: Tabel Dinamis BPS (diolah)

Grafik di atas memberikan gambaran bahwa tingkat kemiskinan di wilayah Provinsi Sulsel senantiasa lebih rendah dari angka nasional. Secara runtun waktu, terjadi tren penurunan tingkat kemiskinan secara gradual, baik secara nasional maupun di wilayah Provinsi Sulsel pada periode pengamatan 2017 s.d. 2019. Di tahun 2020, hadirnya

pandemi *Covid-19* langsung memberikan dampak nyata bagi tren penurunan tingkat kemiskinan. Angka kemiskinan nasional di tahun 2020 meningkat dari 9,22% menjadi 10,19%, demikian halnya Sulsel yang mengalami peningkatan tingkat kemiskinan dari 8,56% menjadi 8,99%. Namun dengan usaha keras pemerintah melalui kebijakan fiskal yang terstruktur dan dinamis melalui Penanganan Covid19-Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), tren angka kemiskinan di tahun 2021 kembali berada di jalur penurunan yakni 9,71% untuk nasional dan 8,53% untuk wilayah Sulsel.

Kab Bone menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di tahun 2021 yakni lebih dari 79 ribu penduduk dan Pare-Pare menjadi

daerah dengan jumlah penduduk miskin terendah, yakni 7,9 ribu penduduk. Secara persentase, Kab Jeneponto menduduki posisi tertinggi yakni 14,28% sedangkan tingkat kemiskinan terendah pada Kota Makassar sebesar 4,82%.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selaku instrumen utama pemerintah dalam implementasi kebijakan fiskal, memiliki peran vital

dalam meraih tujuan bernegara. Dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa APBN (dan APBD) memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Di tengah terjadinya krisis ekonomi, termasuk yang disebabkan oleh hadirnya pandemi Covid-19, peran kebijakan fiskal semakin penting. Kondisi pelemahan dan ancaman resesi ekonomi harus disikapi pemerintah dengan kebijakan ekspansif melalui peningkatan belanja dan/atau penurunan target

PC-PEN, sesuai amanat Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Dari publikasi APBN KiTA, diketahui bahwa realisasi belanja pemerintah pusat dalam APBN tahun 2021 mencapai 2.001 triliun (angka sementara) atau meningkat 9,2% jika dibandingkan realisasi 2020 yang mencapai mencapai Rp1.833 triliun. Realisasi di wilayah Sulsel berdasarkan data MEBE Dit PA menunjukkan bahwa belanja K/L hingga 31 Desember 2021 mencapai Rp19,38 triliun atau meningkat 5,6 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp18,3 triliun. Realisasi belanja APBN melalui Kementerian/Lembaga (K/L) per jenis belanja di wilayah Sulsel tergambar pada grafik berikut ini:

Grafik 2



Sumber: MEBE Kemenkeu (diolah)

penerimaan. Salah satu indikator penting yang menunjukkan ekspansifnya belanja pemerintah adalah lahirnya program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau

Selain secara langsung melalui belanja K/L, kebijakan fiskal pemerintah juga dapat dilaksanakan melalui kebijakan spesifik berupa pembiayaan

kepada sektor-sektor unggulan, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ultra mikro. Terdapat 2 (dua) kebijakan besar pemerintah, yakni program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digulirkan sejak tahun 2007 dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sejak tahun 2017.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 8 tahun 2019, KUR merupakan kredit pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. KUR bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas

8,36 juta debitur. Jumlah tersebut meningkat signifikan dari penyaluran KUR tahun 2020 yang berjumlah Rp192,12 triliun kepada 6,86 juta debitur. Tren yang sama juga terjadi di wilayah Sulsel yang terdiri atas 24 kab/kota. Berdasarkan data SIKP, penyaluran tahun 2021 secara total mencapai Rp14,67 triliun kepada 430 ribu debitur. Jumlah tersebut meningkat 33,1% dibanding dengan realisasi 2020 sebesar Rp11,01 triliun kepada 403 ribu debitur.

Perkembangan penyaluran KUR di wilayah Provinsi Sulsel sejak tahun 2017 hingga 2021 tergambar pada grafik berikut:

Grafik 3



Sumber: SIKP Kemenkeu (diolah)

akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

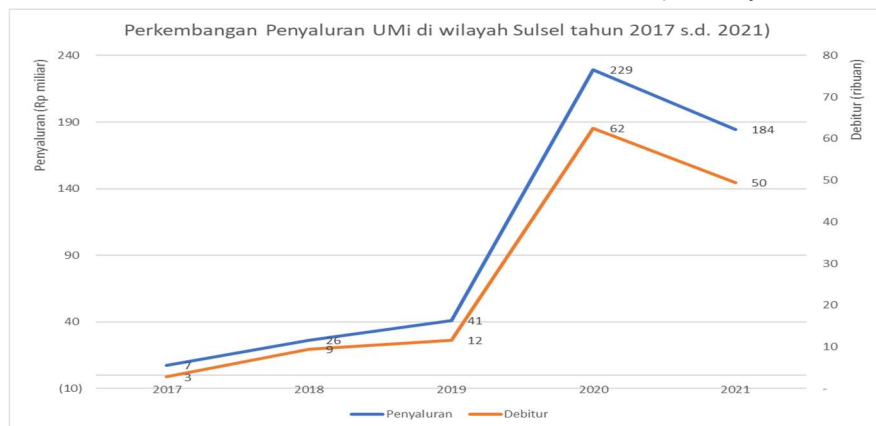
Penyaluran KUR setiap tahun mengalami peningkatan cukup signifikan sesuai target yang ditentukan pemerintah. Berdasarkan data *dashboard* Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), penyaluran KUR tahun 2021 mencapai Rp282,8 triliun kepada

Untuk mengakomodir UMKM yang belum *bankable*, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menghadirkan program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 193/PMK.05/2020 disebutkan bahwa UMi merupakan program fasilitas pembiayaan kepada usaha ultra mikro baik dalam bentuk pembiayaan konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. UMi ditujukan untuk menyediakan fasilitas

pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha ultra mikro serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh pemerintah.

Pembiayaan UMi yang disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) telah menjadi penutup *gap* pembiayaan bagi sektor usaha di rentang paling bawah (ultra mikro) yang selama ini mengalami kendala pembiayaan akibat tidak memenuhi syarat pengajuan kredit ke perbankan. Sebagaimana dikutip dari APBN KiTa, penyaluran UMi sejak tahun 2017 mencapai akumulasi Rp18 triliun dan menjangkau lebih dari 5,3 juta pelaku usaha ultra mikro. Di wilayah Sulsel, total penyaluran telah mencapai Rp488,2 miliar dan menjangkau 135 ribu debitur.

Grafik 4



Sumber: SIKP UMi (diolah)

Perkembangan penyaluran UMi di wilayah Sulsel sejak tahun 2017 s.d. 2021 tergambar pada grafik 4 di atas.

Kebijakan fiskal pemerintah melalui proksi, belanja APBN, KUR, dan UMi diharapkan membawa dampak signifikan bagi penurunan tingkat kemiskinan hingga di tingkat daerah. Kajian atas dampak kebijakan fiskal

belanja pemerintah terhadap penurunan tingkat kemiskinan sudah banyak dilakukan baik menggunakan data perbandingan antar negara maupun data nasional dan wilayah. Hasil kajian empiris secara umum menunjukkan bahwa belanja pemerintah berdampak positif, baik langsung maupun tidak langsung, bagi penurunan angka kemiskinan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dan dalam rangka melengkapi berbagai literatur sebelumnya, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan penelitian mengenai dampak empiris beberapa variabel kebijakan fiskal yang terkait langsung dengan fungsi *treasury* yang diemban oleh Ditjen Perbendaharaan (DJPb). Variabel tersebut yakni belanja APBN, penyaluran KUR, dan pembiayaan UMi dan

dampaknya terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Sulawesi Selatan yang terdiri atas 24 kabupaten/kota. Ketiga variabel *treasury* tersebut, semuanya terkait dengan peran Ditjen Perbendaharaan selaku unit yang menerima pendelegasian atau kuasa dari Bendahara Umum Negara (BUN) yakni Menteri Keuangan. Fungsi Kuasa BUN, khususnya di daerah, saat ini semakin

diperkuat melalui program *Regional Chief Economist (RCE)*. Hasil dan temuan penelitian dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan fiskal dan penguatan peran *RCE* sehingga tujuan bernegara, salah satunya pengentasan kemiskinan, dapat dicapai secara tepat dan terukur.

## **2. TINJAUAN LITERATUR**

### **2.1. Kemiskinan**

Dalam situs resmi BPS, disebutkan bahwa untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK).

GK merupakan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non makanan. Berdasarkan nilai GK maka dapat ditentukan jumlah maupun persentase penduduk miskin.

Menurut PBB sebagaimana dikutip dari situsnya, kemiskinan tidak hanya sekedar kurangnya pendapatan namun lebih luas terkait dengan sumber daya produktif untuk memastikan kehidupan yang berkelanjutan. Manifestasinya antara lain kelaparan dan kekurangan

gizi, akses terbatas pada pendidikan dan layanan dasar lainnya dan diskriminasi.

Dalam rangka pengentasan masalah kemiskinan, kehadiran pemerintah menjadi sebuah hal yang wajib. UUD 1945 pun mengamanatkan negara untuk melindungi kesejahteraan umum. Instrumen pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut melalui kebijakan fiskal.

### **2.2. Kebijakan Fiskal**

Berbicara mengenai kebijakan fiskal tidak dapat dipisahkan dari ekonom asal Inggris John Maynard Keynes yang pandangannya kemudian sering disebut sebagai *Keynesian Economics*. Keynes menyampaikan berbagai teori, salah satunya terkait keterlibatan atau campur tangan pemerintah dalam menstabilisasi perekonomian. Menurut Jahan, S., dkk (2014), beberapa prinsip utama Keynesian antara lain: permintaan agregat (*aggregate demand*) dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk keseimbangan antara sektor swasta maupun pemerintah; Peningkatan belanja pemerintah akan menyebabkan *output* perekonomian akan meningkat, walaupun komponen pengeluaran lain, misalnya konsumsi dan investasi, tetap atau tidak berubah. *Keynesian economics* juga menganggap bahwa komponen pengeluaran, termasuk dari pemerintah akan menghasilkan *multiplier effects* atau efek pengganda.

Secara definisi kebijakan fiskal merupakan tindakan yang ditempuh pemerintah melalui instrumen belanja dan penerimaan (pajak) dalam rangka mempengaruhi kondisi perekonomian. Pemerintah biasanya menggunakan kebijakan fiskal untuk mendorong

pertumbuhan berkelanjutan dan penurunan kemiskinan (Horton, M. dan Asmaa E. (2020). Hubbard *et.al* (2012) sebagaimana dikutip dari artikel Kebijakan Keuangan Negara Bappenas (2018) menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur perubahan pajak, belanja serta transfer pemerintah yang bertujuan untuk memengaruhi kondisi makroekonomi. Secara garis besar, kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah terkait penerimaan dan belanja negara untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah, seperti penurunan ketimpangan dan kemiskinan serta meningkatkan pertumbuhan.

Di Indonesia, arah kebijakan fiskal pemerintah tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang APBN setiap tahunnya. Pengelolaan fiskal dikuasakan oleh Presiden kepada Menteri Keuangan melalui pelaksanaan tugas antara lain: menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; menyusun rancangan APBN/APBN-P; melaksanakan pemungutan pendapatan negara; melaksanakan fungsi bendahara umum negara; menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN; dan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal sesuai ketentuan.

Dengan luasnya ruang lingkup pelaksanaan tugas kebijakan fiskal, maka sebagian tugas tersebut didelegasikan oleh Menteri Keuangan ke jajaran atau unit di bawahnya, salah satunya pelaksanaan fungsi bendahara umum negara (BUN). Pendelegasian fungsi BUN tersebar di beberapa unit

Kementerian Keuangan, salah satunya kepada Ditjen Perbendaharaan (DJPb). Kewenangan BUN sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kebendaharaan Negara antara lain menetapkan kebijakan/pedoman pelaksanaan anggaran, melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara, menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi. Fungsi-fungsi tersebut sebagian besar dilaksanakan oleh DJPb selaku *treasury* negara.

#### 2.2.1. Belanja Pemerintah

Terkait dengan aspek belanja dalam APBN, DJPb memiliki kewenangan yang besar khususnya pada tahapan pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 195/PMK.05/2018, DJPb beserta seluruh unit kerjanya melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L dengan tujuan: menjamin efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi penggunaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran.

Berbagai literatur dan penelitian telah menunjukkan bukti empiris mengenai dampak kebijakan belanja pemerintah terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Penelitian Shenggen Fan, dkk (2000) menyimpulkan bahwa untuk mengurangi tingkat kemiskinan, khususnya di wilayah pedesaan, pemerintah harus memberikan prioritas tertinggi pada pembangunan jalan, pertanian, dan pendidikan. Dahmardeh, N., & Tabar, M. H. (2013) yang melakukan penelitian mengenai dampak belanja pemerintah terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Iran menunjukkan

bahwa belanja kontruksi (infrastruktur) memberikan dampak positif bagi penurunan tingkat kemiskinan. Penelitian lain dari Nugroho, P.E. (2017) menunjukkan bahwa belanja pemerintah secara sektoral antara lain di bidang pertanian, pendidikan, infrastruktur jalan dan irigasi, memberikan kontribusi atas penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Miar & A. Yunani (2020) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa belanja pemerintah berdampak signifikan dan langsung terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Selain itu, belanja pemerintah juga berpengaruh tidak langsung ke penurunan tingkat kemiskinan melalui variabel pertumbuhan ekonomi. Penelitian Taruno, H.T. (2019) membuktikan secara empiris mengenai dampak positif belanja pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan terhadap penurunan kemiskinan di daerah pedesaan.

#### 2.2.2. Kredit Program dan Subsidi Bunga

Sebagai anggota dari Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM, Kementerian Keuangan melalui Ditjen Perbendaharaan juga terlibat secara langsung, baik melalui pengembangan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), maupun dalam bentuk pelaksanaan monev dan survei kemanfaatan KUR oleh Kanwil DJPb. Berdasarkan Peraturan Menko Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019, KUR merupakan kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Pelaksanaan

KUR bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Terkait kredit program dan subsidi bunga sebagaimana yang dilaksanakan di Indonesia dengan nama KUR, program yang sama telah lama dilaksanakan di berbagai negara. Penelitian Juan, J.B (1995) menunjukkan bahwa kredit program dan pemberian subsidi bunga di berbagai negara tidak cukup berhasil dalam pengentasan kemiskinan di kalangan petani. Salah satu alasannya karena lembaga penyalur kredit bersubsidi lebih mengutamakan pemberian pinjaman kepada debitur yang memiliki *credit rating* yang baik. Alhasil, tujuan awal pemerintah memberikan subsidi tidak berhasil karena kredit murah justru dinikmati oleh kalangan yang tidak prioritas. Braverman, A. dkk (1986) menunjukkan bahwa intervensi pemerintah atas kredit pedesaan di berbagai negara berkembang gagal memberikan dampak dalam peningkatan kinerja sektor pertanian dan mengurangi kesenjangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Penelitian lain dari Antunes, A. dkk (2011) atas program subsidi bunga di Brasil menunjukkan bahwa tidak terdapat efek signifikan subsidi bunga terhadap pendapatan perkapita, upah, tingkat kesenjangan atau keuangan pemerintah. Namun jika subsidi menargetkan tingkat bunga tertentu serta perluasan akses atas kredit, maka *output* dan tingkat upah akan meningkat, sepanjang program



subsidi bunga tidak mengganggu kredit non subsidi.

Penelitian dampak KUR terhadap tingkat kemiskinan belum banyak dilakukan di Indonesia. Penelitian dengan subyek KUR lebih banyak difokuskan kepada dampak langsung terhadap perkembangan UMKM. Penelitian Ulfa, M. & Muh Mulyadi (2020) menunjukkan bahwa KUR memiliki dampak positif terhadap pengembangan usaha mikro di Kota Makassar dan pengembangan usaha mikro memiliki dampak positif terhadap penanggulangan kemiskinan.

#### 2.2.3. Pembiayaan Ultra Mikro

Selain fungsi selaku otoritas fiskal, Kementerian Keuangan juga memiliki tugas lain dalam bentuk *special mission vehicles* (SMV). SMV dibentuk dalam rangka mendukung investasi pemerintah dan penyediaan barang dan sarana publik yang dibutuhkan secara sosial ekonomi meskipun tidak menguntungkan secara bisnis/komersil. Fungsi-fungsi yang diemban SMV antara lain penjaminan, pembiayaan, asuransi, dan investasi/pengelolaan dana. Salah satu SMV yang dibentuk yakni Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dirjen Perbendaharaan. PIP saat ini ditunjuk menjadi koordinator *collecting fund* dalam rangka pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang telah berjalan sejak tahun 2017. Program UMi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 193/PMK.05/2020 merupakan program fasilitas pembiayaan kepada usaha ultra mikro baik dalam bentuk konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Tujuan UMi adalah menyediakan fasilitas pembiayaan yang

mudah dan cepat bagi usaha ultra mikro serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi pemerintah. UMi disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) antara lain Pegadaian dan PNM, dengan pembiayaan maksimal Rp20 juta.

Berbicara mengenai *microfinance*, tak dapat lepas dari sosok Muhammad Yunus, selaku pendiri Grameen Bank yang didirikan tahun 1983 di Bangladesh. Grameen Bank merupakan institusi penyedia kredit mikro kepada masyarakat miskin agar dapat mandiri dan mengembangkan usaha. Berkat usahanya Muhammad Yunus menerima penghargaan Nobel di tahun 2006.

Literatur dan penelitian mengenai dampak pemberian kredit mikro kepada masyarakat miskin telah banyak dilakukan di mancanegara. Salah satu yang dapat dijadikan referensi dari Félix, E.G.S. dkk (2019) menunjukkan bahwa penyaluran *microcredit* di 11 negara berkembang memberikan dampak signifikan bagi penurunan angka kemiskinan. Hasil studi yang sama juga menyimpulkan bahwa tenaga kerja dan pendidikan juga menurunkan tingkat kemiskinan. Penelitian mengenai dampak UMi belum banyak dilakukan di Indonesia. Hal tersebut bisa jadi disebabkan karena program UMi baru diluncurkan sejak tahun 2017 dan akses data atas penyaluran masih terbatas sehingga tidak menarik bagi peneliti. Salah satu penelitian mengenai UMi dilakukan oleh Hia, V. dkk (2021) menunjukkan bahwa program UMi memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan produksi industri mikro dan kecil namun tidak memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi regional, yang ditunjukkan oleh PDRB.

### 2.3. IPM

Dikutip dari situs resmi BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. Pada tahun 1990, *United Nations Development Programme (UNDP)* membangun indeks ini untuk menekankan pentingnya manusia beserta sumber daya yang dimilikinya dalam pembangunan.

Dalam laporan BPS mengenai IPM Tahun 2020, disebutkan bahwa indeks dalam IPM terbentuk dari rata-rata skor capaian tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan umur harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diukur dengan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas dan harapan lama sekolah penduduk yang berumur 7 tahun. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diukur dengan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan.

Literatur dan kajian mengenai dampak IPM bagi upaya penyelesaian masalah kemiskinan telah banyak dilakukan peneliti. Penelitian Elistia, E. dkk (2018) menunjukkan hubungan positif antara IPM dengan pendapatan perkapita penduduk di 10 negara ASEAN. Peningkatan kualitas manusia akan berdampak pada peningkatan kondisi pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pendapatan perkapita akan berdampak bagi pengurangan angka kemiskinan. Penelitian lain dari Yusuf,

L.A. dkk (2020) menyimpulkan bahwa IPM berdampak bagi penurunan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode analisis kuantitatif dengan pendekatan regresi linear data panel dengan bantuan aplikasi EViews 12. Data yang digunakan adalah gabungan *cross-section* sejumlah 24 kab/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan data *time-series* tahun 2017 s.d. 2021, sehingga total data observasi sebanyak 120. Data yang digunakan antara lain belanja K/L baik secara total maupun per jenis belanja, data penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Ketiga variabel tersebut diposisikan sebagai proksi atas kebijakan fiskal pemerintah yang secara langsung terkait tugas DJPb selaku *treasury*. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan istilah variabel *treasury* untuk ketiga jenis variabel dimaksud. Data lain diperoleh dari BPS, yakni tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan data *dummy* untuk mengetahui dampak Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 lalu.

Alasan menggunakan data panel pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak implementasi kebijakan fiskal hingga tingkat kab/kota di Sulsel. Alasan lain yang umum adalah ketersediaan data yang lebih banyak dibandingkan hanya menggunakan data *time-series* atau *cross-section* secara sendiri-sendiri. Dengan jumlah observasi yang lebih banyak maka dapat diperoleh data yang lebih informatif, bervariasi, mengurangi multikolinearitas antar

variabel, *degree of freedom* lebih besar, dan lebih efisien (Gujarati, (2003).

### 3.1. Hipotesis Penelitian

Kebijakan fiskal merupakan instrumen penting pemerintah dalam mencapai kesejahteraan umum, termasuk pengentasan kemiskinan. Berbagai literatur telah menunjukkan bahwa belanja pemerintah melalui APBN, baik agregat maupun sektoral memberi dampak signifikan bagi penurunan tingkat kemiskinan. Di sisi lain tidak dapat diabaikan juga mengenai instrumen fiskal (kuasi fiskal) lain, termasuk program KUR dan UMi yang tujuan utamanya mendukung pengembangan dan kemajuan sektor UMKM dan memberikan *trickle-down effect* bagi penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menjawab beberapa hipotesis penelitian, yakni:

- Belanja pemerintah pusat, baik secara agregat maupun per jenis belanja, memiliki dampak signifikan bagi penurunan tingkat kemiskinan di wilayah Sulsel;
- Penyaluran KUR memiliki dampak signifikan bagi penurunan tingkat kemiskinan di Sulsel;
- Pembiayaan UMi memiliki dampak signifikan bagi penurunan tingkat kemiskinan di Sulsel;
- Terjadinya pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 signifikan berdampak pada meningkatnya kemiskinan di Sulsel.

### 3.2. Data dan Variabel

Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber

resmi Ditjen Perbendaharaan dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data *time-series* tahun 2017 s.d. 2021 digabungkan dengan data *cross-section* di lokus 24 kab/kota di wilayah Sulsel dan menghasilkan 120 observasi data panel.

Variabel yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengetahui dampak kebijakan fiskal bagi penurunan angka kemiskinan di wilayah Sulsel.

- Tingkat Kemiskinan tahun 2017 s.d. 2021 di kab/kota se-Sulsel dalam bentuk persentase (variabel dependen dengan notasi "Poverty");
- Realisasi belanja agregat K/L pada APBN tahun 2017 s.d. 2021 di kab/kota se-Sulsel dalam bentuk logaritma natural (variabel independen dengan notasi APBN);
- Realisasi belanja pegawai dalam APBN tahun 2017 s.d. 2021 di kab/kota se-Sulsel dalam bentuk logaritma natural (variabel independen dengan notasi Bel51);
- Realisasi belanja barang dalam APBN tahun 2017 s.d. 2021 di kab/kota se-Sulsel dalam bentuk logaritma natural (variabel independen dengan notasi Bel52);
- Realisasi belanja modal dalam APBN tahun 2017 s.d. 2021 di kab/kota se-Sulsel dalam bentuk logaritma natural (variabel independen dengan notasi Bel53);
- Realisasi penyaluran KUR tahun 2017 s.d. 2021 di kab/kota se-Sulsel dalam bentuk logaritma (variabel independen dengan notasi KUR);
- Realisasi penyaluran pembiayaan UMi tahun 2017 s.d. 2021 di kab/kota se-Sulsel dalam bentuk logaritma

(variabel independen dengan notasi UMi);

- Capaian IPM tahun 2017 s.d. 2021 di kab/kota se-Sulsel dalam bentuk angka indeks (variabel independen dengan notasi IPM).
- DumCov merupakan variabel *dummy* dengan nilai antara 0 dan 1 untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 terhadap tingkat kemiskinan di kab/kota se-Sulsel.

### 3.3. Model Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka digunakan regresi linear berganda data panel dengan model sebagai berikut:

$$Poverty_{it} = \alpha + \beta_1 APBN_{it} + \beta_2 KUR_{it} + \beta_3 UMi_{it} + \beta_4 IPM_{it} + \beta_5 DumCov + e$$

Untuk melihat dampak belanja pemerintah secara detil berdasarkan jenis belanja, dilakukan regresi model kedua sebagai pembanding:

$$Poverty_{it} = \alpha + \beta_1 Bel51_{it} + \beta_2 Bel52_{it} + \beta_3 Bel53_{it} + \beta_4 KUR_{it} + \beta_5 UMi_{it} + \beta_6 IPM_{it} + \beta_7 DumCov + e$$

Keterangan:

Poverty = Tingkat kemiskinan

APBN = Belanja K/L secara agregat

Bel51 = Belanja Pegawai

Bel52 = Belanja Barang

Bel53 = Belanja Modal

KUR = penyaluran KUR

UMi = penyaluran UMi

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

Dumcov = variabel dummy dampak periodik pasca terjadinya Covid-19 sejak tahun 2020

$\alpha$  = konstanta  $\beta$  = koefisien

$e$  = *error terms*

$i$  = individu (data kab/kota)

$t$  = data *time series*

### 3.4. Metode pengolahan data

Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda data panel, lebih tepatnya *balanced panel* karena setiap data *cross-section* dalam model memiliki jumlah *time-series* yang sama, yakni 2017 s.d. 2021. Gujarati (2003) membagi regresi data panel dalam dua kelompok besar, yakni pendekatan *fixed effects* dan *random effects*.

Pendekatan *fixed effects* menggunakan lima asumsi, dua diantaranya adalah koefisien dan konstanta sama atau konstan untuk setiap individu dan waktu. Model ini di berbagai literatur diistilahkan sebagai *Common Effect Model (CEM)*. CEM merupakan model regresi data panel paling sederhana dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)*. Model selanjutnya mengasumsikan koefisien setiap individu sama namun konstanta bervariasi antar individu atau dikenal sebagai *Fixed Effect Model (FEM)* atau *Least-Square Dummy Variabel (LSDV)* karena menggunakan variabel *dummy* untuk menangkap perbedaan konstanta antar individu. Salah satu kelemahan metode ini adalah penggunaan variabel *dummy* untuk masing-masing variabel independen. Misalnya model regresi menggunakan lima variabel, maka variabel *dummy* yang digunakan sebanyak empat. Hal tersebut menyebabkan *degree of freedom* semakin kecil.

Pendekatan *random effects* mengasumsikan variasi antar individu dan antar waktu tergambar melalui residual. Perbedaan koefisien antar individu diakomodir dalam *error terms* masing-masing. Model ini dikenal dengan istilah *Random Effect Model*

(REM) atau *Error Component Model* (ECM). Berbeda dengan CEM dan FEM yang menggunakan regresi OLS, model REM menggunakan teknik *Generalized Least Square* (GLS).

Pemilihan model terbaik (CEM vs FEM vs REM) yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Langrange Multiplier (LM).

Uji Chow untuk memilih antara CEM atau FEM:

H0: Model CEM yang sesuai (*Prob Cross-Section Chi Square* > 0,05)

H1: Model FEM yang sesuai (*Prob Cross-Section Chi Square* < 0,05)

Uji Hausman untuk memilih FEM atau REM:

H0: Model REM yang sesuai (*Prob  $\alpha$*  > 0,05)

H1: Model FEM yang sesuai (*Prob  $\alpha$*  < 0,05)

Uji *Langrange Multiplier* (LM) untuk memilih FEM atau CEM:

H0: Model CEM yang sesuai (*Prob  $\alpha$*  > 0,05)

H1: Model REM yang sesuai (*Prob  $\alpha$*  < 0,05)

Agar hasil estimasi atas model tidak bias atau BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) perlu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri atas Uji Normalitas, Multikolinearitas, Heteroskedastisitas, dan Autokorelasi. Jenis pengujian yang dilakukan disesuaikan dengan model terbaik yang dipilih, apakah CEM, FEM, atau REM.

Langkah selanjutnya sebelum dilakukan interpretasi atas hasil regresi adalah Uji Koefisien Determinasi (*R Square* dan *Adjusted R Square*) untuk mengetahui seberapa besar pengaruh atau kontribusi variabel independen secara bersama-sama atau simultan

terhadap variabel dependen. Uji lain adalah Uji F untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen, serta Uji t untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara sendiri-sendiri (parsial) terhadap variabel independen.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Pemilihan Model dan Uji Statistik

Terlebih dahulu dilakukan Uji Chow untuk menentukan model terbaik antara CEM atau FEM.

#### *Uji Chow Model 1:*

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: EQ01\_FEM

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	277.111481	(23,91)	0.0000
Cross-section Chi-square	511.587762	23	0.0000

#### *Uji Chow Model 2:*

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: EQ02\_FEM

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	272.322081	(23,89)	0.0000
Cross-section Chi-square	512.154341	23	0.0000

Kedua hasil Uji Chow menunjukkan bahwa *Prob Cross-Section Chi Square* < 0,05 yang berarti menolak H<sub>0</sub> dan menerima H<sub>1</sub> sehingga disimpulkan model FEM lebih baik daripada CEM. Pengujian selanjutnya adalah Uji Hausman untuk menentukan model terbaik antara FEM dengan REM.

#### *Uji Hausman Model 1:*

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: EQ01\_REM

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.179740	5	0.1466

### Uji Hausman Model 2:

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: EQ02.REM  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	7.463578	7	0.3823

Kedua hasil Uji Hausman menunjukkan prob  $\alpha > 0,05$  yang berarti  $H_0$  diterima sehingga disimpulkan bahwa model REM lebih baik daripada FEM. Karena REM yang terpilih maka dilanjutkan dengan tes ketiga, yakni Uji LM untuk memilih antara model CEM atau REM.

### Uji LM Model 1:

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	209.2232 (0.0000)	0.767092 (0.3811)	209.9902 (0.0000)

### Uji LM Model 2:

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	208.1501 (0.0000)	1.253238 (0.2629)	209.4033 (0.0000)

Dengan probabilita *Breusch-Pagan* (*both*) semua di bawah 0,05, maka model final yang akan digunakan dan dianalisis lebih lanjut adalah model *Random Effect Model* (REM).

Berikuti ringkasan hasil regresi model REM sebelum uji asumsi klasik:

Tabel 1

Variabel	Model 1: Poverty		Variabel	Model 2: Poverty	
	Koefisien	t-Prob		Koefisien	t-Prob
C	45.85818	0.0000	C	52.36729	0.0000
APBN	-0.560028	0.0138	Bel51	-0.665986	0.0221
			Bel52	-0.163109	0.2009
			Bel53	0.005874	0.9110
KUR	-0.371286	0.0347	KUR	-0.379268	0.0292
UMI	-0.148108	0.0008	UMI	-0.125114	0.0083
IPM	-0.123944	0.0041	IPM	-0.130338	0.0026
DUMCOV	0.249206	0.0765	DUMCOV	0.259075	0.0850
R <sup>2</sup>	0.552280		R <sup>2</sup>	0.571079	
Adjusted R <sup>2</sup>	0.532643		Adjusted R <sup>2</sup>	0.544272	
F-statistic	28.12468		F-statistic	21.30292	
Prob(F-stat)	0.000000		Prob(F-stat)	0.000000	
Jarque-Bera	6.225621		Jarque-Bera	5.170578	
Prob Jarque-Bera	0.044476		Prob Jarque-Bera	0.075374	

## 4.2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan interpretasi dan pembahasan atas hasil regresi final di atas, perlu dilakukan beberapa uji asumsi klasik. Karena model yang terpilih adalah REM yang menggunakan metode *Generalized Least Square* (GLS) maka diasumsikan terbebas dari masalah Heteroskedasitas dan Autokorelasi. Pengujian yang dilakukan hanya asumsi normalitas atas residual dan multikolinearitas.

### 4.2.1. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas atas residual pada persamaan menunjukkan hasil berbeda, sebagaimana terlihat pada Prob Jarque-Bera. Pada model 1 nilai Prob Jarque-Bera 0,044476 atau < dari 0,05 sehingga terindikasi residual tidak normal. Di sisi lain, model 2 menunjukkan Prob Jarque-Bera 0,075374 atau > dari 0,05 sehingga residual terdistribusi normal.

Tidak dilakukan *treatment* khusus atas data yang terdistribusi tidak normal pada model 1 dengan asumsi *central limit theorem* (CLT) (Gujarati, 2003) yang menyatakan bahwa dengan semakin meningkatnya data sampel yang digunakan maka data akan mengarah ke distribusi normal. Sampel data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak

120 sehingga diasumsikan memenuhi CLT.

#### 4.2.2. Uji Multikolinearitas

##### Uji Multikolinearitas Model 1:

	APBN	KUR	UMI	IPM	DUMCOV
APBN	1.000000	0.467684	0.330119	0.477379	-0.008033
KUR	0.467684	1.000000	0.672609	0.241834	0.451443
UMI	0.330119	0.672609	1.000000	0.112459	0.690631
IPM	0.477379	0.241834	0.112459	1.000000	0.031176
DUMCOV	-0.008033	0.451443	0.690631	0.031176	1.000000

##### Uji Multikolinearitas Model 2:

	BEL51	BEL52	BEL53	KUR	UMI	IPM	DUMCOV
BEL51	1.000000	0.915259	0.677809	0.574039	0.413457	0.431277	0.061384
BEL52	0.915259	1.000000	0.734508	0.415658	0.322561	0.512886	-0.069208
BEL53	0.677809	0.734508	1.000000	0.105312	0.037426	0.390232	-0.126419
KUR	0.574039	0.415658	0.105312	1.000000	0.672609	0.241834	0.451443
UMI	0.413457	0.322561	0.037426	0.672609	1.000000	0.112459	0.690631
IPM	0.431277	0.512886	0.390232	0.241834	0.112459	1.000000	0.031176
DUMCOV	0.061384	-0.069208	-0.126419	0.451443	0.690631	0.031176	1.000000

Berdasarkan hasil uji korelasi pada kedua model di atas, ditemukan multikolinearitas yang sangat tinggi pada model 2, yakni antara variabel Bel51 (Belanja Pegawai) dan Bel52 (Belanja Barang) dengan koefisien korelasi 0,915259. Secara teoritis, nilai di

karena Belanja Pegawai merupakan bentuk transfer dari pemerintah ke masyarakat, khususnya pegawai pemerintah, sehingga meningkatkan *disposable income* yang diharapkan meningkatkan konsumsi di masyarakat dan berimplikasi positif bagi penurunan angka kemiskinan.

Model persamaan final yang akan dianalisis lebih lanjut dituliskan sebagai berikut:

$$\text{POVERTY} = 45.85818 - 0.56002 \cdot \text{APBN} - 0.37128 \cdot \text{KUR} - 0.14810 \cdot \text{UMI} - 0.12394 \cdot \text{IPM} + 0.24920 \cdot \text{DUMCOV} + [CX=R] \quad (\text{model 1})$$

$$\text{POVERTY} = 53.31217 - 0.78729 \cdot \text{BEL51} - 0.40498 \cdot \text{KUR} - 0.14428 \cdot \text{UMI} - 0.14119 \cdot \text{IPM} + 0.36188 \cdot \text{DUMCOV} + [CX=R] \quad (\text{model 2})$$

Tabel 2

Variabel	Model 1: Poverty		Variabel	Model 2: Poverty	
	Koefisien	t-Prob		Koefisien	t-Prob
C	45.85818	0.0000	C	53.31218	0.0000
APBN	-0.560028	0.0138	Bel51	-0.787298	0.0036
KUR	-0.371286	0.0347	KUR	-0.404984	0.0174
UMI	-0.148108	0.0008	UMI	-0.144281	0.0010
IPM	-0.123944	0.0041	IPM	-0.141197	0.0007
DUMCOV	0.249206	0.0765	DUMCOV	0.361884	0.0049
$R^2$	0.552280		$R^2$	0.562771	
Adjusted $R^2$	0.532643		Adjusted $R^2$	0.543594	
F-statistic	28.12468		F-statistic	29.34660	
Prob(F-stat)	0.000000		Prob(F-stat)	0.000000	
Jarque-Bera	6.225621		Jarque-Bera	5.205120	
Prob Jarque-Bera	0.044476		Prob Jarque-Bera	0.074084	

atas 0,8 dianggap mengarah pada pelanggaran asumsi klasik, yakni multikolinearitas. Oleh karena itu, salah satu variabel akan dihilangkan.

Dilakukan *treatment* khusus untuk mengatasi pelanggaran asumsi klasik, multikolinearitas, dengan mengeluarkan salah satu variabel yakni Bel52. Bel53 sekaligus dikeluarkan dari model karena hasil regresi pada tidak signifikan secara statistik. Pertimbangan pemilihan Bel51

Tabel 2 merupakan ringkasan hasil regresi model REM. Hasil Uji t menunjukkan bahwa semua variabel independen, baik pada model 1 maupun model 2, signifikan secara statistik berpengaruh secara sendiri-sendiri atau parsial terhadap variabel dependen, ditunjukkan dengan prob t-stat yang di bawah 0,01, 0,05, dan 0,10. Uji F menunjukkan hasil yang sama, dengan Prob F-stat di bawah 0,05 pada kedua

model, sehingga disimpulkan bahwa seluruh variabel independen signifikan berpengaruh pada variabel dependen, yakni tingkat kemiskinan. Koefisien determinasi atau  $R^2$  dan *Adjusted R<sup>2</sup>* menunjukkan hasil moderat, masing-masing 55% dan 53% pada model 1, serta 56% dan 54% pada model 2.

#### **4.3. Pembahasan Hasil**

##### **4.3.1. Dampak Belanja Pemerintah terhadap Tingkat Kemiskinan**

Belanja agregat K/L pada APBN di wilayah Sulsel signifikan berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Setiap terjadi kenaikan belanja pemerintah sebesar 1% akan berdampak pada turunnya tingkat kemiskinan sebesar 0,56%, dengan mengabaikan pengaruh variabel lain atau *ceteris paribus*. Demikian halnya jika variabel Belanja K/L agregat diganti dengan Bel51 (Belanja Pegawai) berdampak signifikan bagi penurunan tingkat kemiskinan. Setiap kenaikan Bel51 sebesar 1% akan berdampak pada menurunnya tingkat kemiskinan sebesar 0,78%, *ceteris paribus*;

Hasil tersebut sesuai dengan teori bahwa belanja pemerintah memberikan dampak positif bagi penurunan angka kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung melalui pemberian bantuan atau transfer kepada masyarakat miskin dan rentan miskin. Dampak tidak langsung ditransmisikan antara lain melalui peningkatan kondisi ekonomi, penciptaan lapangan kerja, penguatan daya beli.

Walaupun memiliki dampak positif, namun kondisi keuangan pemerintah tidak bisa serta-merta melakukan ekspansi belanja dalam upaya

mengurangi tingkat kemiskinan. *Objective function* dari pemerintah tidak hanya pada aspek kemiskinan, namun indikator kesejahteraan lain perlu perhatian, dan semua aspek tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Variabel Belanja Pegawai yang menunjukkan hasil positif juga tidak serta merta dapat diinterpretasikan bahwa pemerintah dapat menaikkan belanja kepada pegawai, karena setiap kenaikan belanja pegawai akan memberikan *trade-off* di sisi *liability* pemerintah, yakni penyediaan anggaran tambahan untuk belanja pensiunan pegawai. Langkah yang ditempuh pemerintah selama ini melalui pemberian gaji bulan ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) merupakan langkah yang tepat untuk menjaga daya beli pegawai, sehingga diharapkan memberikan *trickle-down effect* bagi penurunan angka kemiskinan.

Selanjutnya yang perlu dioptimalkan pemerintah adalah peningkatan kualitas belanja dan *output* yang dihasilkan agar *multiplier effect* yang ditimbulkan jauh lebih besar. Upaya yang dapat dilakukan antara lain akselerasi realisasi belanja sejak awal tahun sehingga manfaat dari setiap kegiatan pemerintah dapat dirasakan sedini mungkin oleh masyarakat. Aspek penguatan monitoring dan evaluasi serta analisis atas dampak belanja pemerintah perlu dipertajam untuk mengetahui potensi inefisiensi dan inefektivitas dari setiap belanja. Posisi DJPb selaku *treasury* sangat strategis pada aspek ini melalui upaya akselerasi belanja sekaligus mengawal kualitas output belanja pemerintah.



#### **4.3.2. Dampak Penyaluran KUR terhadap Tingkat Kemiskinan**

Penyaluran KUR di wilayah Sulsel signifikan berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Setiap terjadi kenaikan penyaluran KUR sebesar 1%, akan berdampak pada menurunnya tingkat kemiskinan sebesar 0,37% (model 1) dan 0,40% (model 2), *ceteris paribus*.

Upaya pemerintah dalam mendukung tumbuh kembangnya UMKM melalui program KUR perlu didukung karena telah mampu menyediakan pembiayaan murah bagi UMKM yang ingin melakukan ekspansi usaha. Sejak tahun 2020 lalu bahkan pemerintah melakukan upaya ekstra di tengah terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya kontraksi ekonomi. Berbagai upaya dilakukan pemerintah, antara lain program restrukturisasi kredit, tambahan subsidi bunga sehingga biaya kredit semakin murah.

Implementasi KUR bukannya tanpa kendala. Yang banyak mengemuka adalah ketidaktepatan sasaran, di mana KUR yang tujuannya untuk usaha produktif justru digunakan untuk keperluan konsumtif.

Peran Kanwil DJPb selaku CRE dalam proses bisnis penyaluran KUR dilakukan melalui pelaksanaan monitoring, evaluasi, serta survei kemanfaatan, baik terhadap lembaga penyalur maupun kepada debitur.

#### **4.3.3. Dampak Penyaluran UMi terhadap Tingkat Kemiskinan**

Penyaluran pembiayaan UMi di wilayah Sulsel signifikan berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Setiap terjadi kenaikan pembiayaan UMi sebesar 1%, akan berdampak pada menurunnya tingkat kemiskinan sebesar

0,14% pada kedua model, *ceteris paribus*.

Hasil tersebut sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya mengenai dampak *microfinance* terhadap pengurangan tingkat kemiskinan.

Sebagai sebuah program yang baru diluncurkan sejak tahun 2017, pembiayaan UMi telah mampu menyentuh lapisan ekonomi terbawah. Dikuti dari APBN KiTA Januari 2022, pembiayaan UMi telah terealisasi secara akumulatif hingga Desember 2021 sebesar Rp18 triliun kepada 5,3 juta debitur melalui 51 Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Capaian ini melebihi target dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024, sebanyak 4,9 juta pelaku usaha pada akhir tahun 2024.

Upaya akselerasi penyaluran UMi hingga di pelosok daerah masih membutuhkan upaya lebih dari berbagai pihak. Di Sulsel, total penyaluran UMi sejak tahun 2017 hingga 2021 baru mencapai Rp488 miliar kepada 135 ribu debitur. Jumlah tersebut masih sangat minim jika dibandingkan dengan realisasi nasional, yakni 2,71% dari sisi nilai penyaluran dan 2,56% dari jumlah debitur nasional. Ruang untuk penyaluran pembiayaan yang lebih besar, khususnya di Sulsel masih terbuka lebar.

Seluruh KPPN mendapat penugasan untuk melaksanakan survei terkait keekonomian debitur UMi yang terdiri atas survei *baseline* dan *endline* yang pada intinya mengukur kemajuan debitur dan usaha yang dijalankan. Selain itu, KPPN secara berkala juga dilakukan monitoring atas ketepatan data penyaluran oleh LKBB.

#### 4.3.4. Dampak IPM terhadap Tingkat Kemiskinan

IPM yang dimaksudkan sebagai variabel kontrol, juga signifikan berpengaruh pada penurunan tingkat kemiskinan di Sulsel. Setiap kenaikan IPM sebesar 1 poin absolut, akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,12% (model 1) dan 0,14% (model 2), *ceteris paribus*.

Hasil tersebut sejalan dengan berbagai literatur yang sudah dipaparkan pada bagian sebelumnya. IPM merupakan indikator atas kualitas pembangunan SDM di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai IPM, semakin tinggi pula kualitas SDM, dan semakin besar peluang untuk meraih penghidupan yang lebih baik.

Nilai IPM Sulsel di tahun 2021 72,24 atau meningkat 0,31 poin dari capaian 2020 sebesar 71,93. IPM Sulsel senantiasa beriringan dengan angka IPM nasional yang di tahun 2021 sebesar 72,29 dan tahun 2020 71,94. Jika dibandingkan lebih lanjut antar kab/kota di Sulsel, masih terjadi simpangan yang cukup lebar antar nilai IPM. IPM Kota Makassar yang menduduki posisi tertinggi dengan nilai 82,66 jauh di atas nilai terendah pada Kab Jeneponto sebesar 64,56.

#### 4.3.5. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil regresi pada kedua model juga menunjukkan bahwa hadirnya pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 s.d. 2021 signifikan berdampak bagi meningkatnya tingkat kemiskinan di Sulsel.

Dampak hadirnya Covid-19 terhadap peningkatan tingkat kemiskinan dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 5



Sumber: BPS Sulsel (data diolah)

Hingga tahun 2019, tren penurunan angka dan tingkat kemiskinan masih berada pada jalur yang tepat. Namun pada tahun 2020, tren berbalik arah, ditandai dengan terjadinya kenaikan angka maupun tingkat kemiskinan penduduk di Sulsel, baik periode Maret maupun September 2020. Namun berkat berbagai upaya pemerintah melalui bauran berbagai kebijakan, termasuk PC-PEN, profil kemiskinan Sulsel di tahun 2021 menunjukkan tanda reversal ke tren penurunan. Bahkan tingkat kemiskinan periode September 2021, yakni 8,53% sudah lebih rendah daripada periode yang sama di tahun 2019, sebelum terjadinya krisis, yang berada di angka 8,56%.

Dikutip dari artikel di situs resmi Kementerian Keuangan, Kepala BKF mengatakan bahwa program PEN memberi kontribusi penurunan persentase dan jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2021, realisasi sementara total anggaran perlindungan sosial, baik yang dilaksanakan melalui belanja pemerintah pusat maupun Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) adalah Rp480 triliun atau 130,5 persen dari pagu APBN 2021.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil analisis dan pembahasan telah mampu menjawab hipotesis penelitian pada bagian sebelumnya.

Belanja agregat K/L, memiliki dampak signifikan bagi penurunan tingkat kemiskinan di wilayah Sulsel. Walaupun jika diteliti lebih lanjut menggunakan data per jenis belanja, hanya Belanja Pegawai yang signifikan secara statistik memberikan dampak penurunan tingkat kemiskinan. Belanja Barang secara statistik juga signifikan, tapi mengalami korelasi yang tinggi dengan variabel Belanja Pegawai sehingga dikeluarkan dari model persamaan. Belanja Modal tidak dimasukkan dalam model final karena secara statistik tidak signifikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hal tersebut bisa jadi karena Belanja Modal di kab/kota tidak menyebar secara merata. Bisa jadi Belanja Modal akan memberikan dampak signifikan jika data APBD dimasukkan dalam model.

Hipotesis kedua terjawab dengan hasil pengujian yang menunjukkan bahwa penyaluran KUR memiliki dampak signifikan bagi penurunan tingkat kemiskinan di Sulsel. Hipotesis ketiga juga terjawab dengan kesimpulan bahwa pembiayaan UMi juga memiliki dampak signifikan bagi penurunan tingkat kemiskinan di Sulsel. Hipotesis terakhir yakni pengaruh hadirnya pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 terbukti memberikan dampak negatif berupa naiknya tingkat kemiskinan di Sulsel.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan dalam rangka lebih meningkatkan kinerja kebijakan fiskal dalam mengurangi tingkat kemiskinan,

direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

### Aspek Belanja Pemerintah

Belanja pemerintah perlu dakselerasi agar tidak menumpuk di akhir tahun. Semakin cepat direalisasikan maka *multiplier effects* belanja pemerintah akan semakin meningkat. Target realisasi menjadi salah satu indikator penilaian dalam IKPA, sebagaimana diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor: PER-4/PB/2021 sehingga efektif “memaksa” satker merealisasikan belanja sesuai target.

Hal lain yang penting untuk dilaksanakan adalah perbaikan kualitas belanja pemerintah (baik pusat maupun daerah). Obyek dalam penelitian ini memang hanya APBN, namun APBD juga memiliki alokasi anggaran besar. Oleh karena itu perlu sinkronisasi program antara APBN dan APBD sehingga tidak terjadi *overlapping* dalam penganggaran yang berakibat pada tidak optimalnya sumberdaya.

Upaya lain yang dilakukan adalah peningkatan kualitas belanja pemerintah. Pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya, antara lain melalui *redesign* sistem penganggaran, penguatan kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran melalui implementasi Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Sejak diimplementasikan oleh DJPb beberapa tahun terakhir, kinerja pelaksanaan anggaran yang salah satunya diukur dari distribusi realisasi anggaran per triwulan, berjalan sesuai dengan target, yakni 15% di triwulan I, 40% hingga triwulan II, 60% hingga triwulan III, dan minimal 90%

hingga triwulan IV. Inisiatif yang sama perlu diterapkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran dalam APBD.

Dalam kapasitas sebagai *Regional Chief Economist (RCE)*, Ditjen Perbendaharaan (DJPb) beserta seluruh unit vertikal di daerah telah mengambil berbagai strategis dalam peningkatan kualitas belanja pemerintah, antara lain melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR) dan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA).

### **Aspek Penyaluran KUR**

Alokasi anggaran besar yang digelontorkan pemerintah dalam mendukung subsidi bunga program KUR mampu menyokong tumbuh kembangnya sektor UMKM, termasuk di saat hadirnya pandemi Covid-19. Namun tetap diperlukan upaya pengawasan atas implementasi di lapangan agar subsidi bunga tepat sasaran. Sebagai gambaran, pada kegiatan FGD Pembiayaan UMKM yang diselenggarakan KPPN Palopo pada 30 September 2021 dan dihadiri oleh pihak perbankan, lembaga keuangan, dan pemda, mengemuka mengenai masih ditemukannya fakta di lapangan bahwa terdapat KUR dicairkan oleh debitur yang digunakan untuk kebutuhan konsumtif dan bukan untuk pengembangan usaha.

Pemda memiliki peran penting dalam mata rantai penyaluran KUR, yakni menyediakan data calon debitur potensial yang diinput ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang dibangun oleh Kementerian Keuangan. Namun hasil evaluasi selama ini menunjukkan bahwa kuantitas dan kualitas data calon debitur yang diinput

belum optimal sehingga belum dijadikan rujukan bagi perbankan untuk penilaian awal kelayakan usaha. Hal lain yang menjadi kendala adalah akses data calon debitur belum seluruhnya bisa dilakukan oleh cabang perbankan. Perlu upaya, baik dari sisi regulasi maupun implementasi, agar data calon debitur yang diinput oleh pemda akurat dan menjadi rujukan awal bagi pengambilan keputusan pemberian KUR oleh pihak perbankan.

Unit vertikal DJPb di daerah selama ini mendapat penugasan untuk melakukan survei secara *sampling* atas debitur terpilih sebagai bagian dari monitoring evaluasi atas penyaluran KUR di wilayah. Namun peran yang diemban masih perlu dioptimalkan sehingga mampu mendeteksi ketidaktepatan sasaran program, baik melalui uji petik maupun hasil analisis data.

### **Aspek Pembiayaan UMi**

Sektor ultra mikro yang merupakan lapisan terbawah UMKM memiliki potensi besar berkontribusi bagi penurunan angka kemiskinan. Karena didominasi sektor informal yang rentan dan dekat dengan garis kemiskinan maka membutuhkan kehadiran pemerintah secara khusus. Keterbatasan akses pembiayaan dan pendampingan untuk memulai atau mengembangkan usaha dijumpai pemerintah melalui program UMi. Pembiayaan UMi yang baru berjalan sejak tahun 2017 memang belum tersosialisasi dan terakselerasi secara lebih masif. Oleh karena itu, perlu upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai telah hadirnya pembiayaan UMi di tengah-tengah masyarakat.

Berbeda dengan KUR yang bunganya sebagian disubsidi pemerintah, UMi tidak mendapat perlakuan yang sama. Laiknya program *microlending*, bunga yang dibebankan pada debitur cenderung lebih tinggi daripada bunga kredit perbankan umumnya. Hal tersebut salah satunya disebabkan adanya kewajiban pendampingan usaha dari penyalur UMi kepada para debitur sehingga berdampak pada biaya operasional lebih tinggi bagi penyalur. Untuk menyiasati hal tersebut, perlu melibatkan juga pihak pemda dalam berkontribusi membantu pendanaan program dan/atau menyubsidi bunga. KPPN Palopo di tahun 2021 lalu telah berhasil menjembatani Kerjasama antara Pemda Luwu Utara dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dalam pendanaan bersama dan subsidi bunga UMi di wilayah Luwu Utara. Hal tersebut dipercaya akan semakin mengakselerasi penyaluran pembiayaan karena biaya yang dibebankan kepada debitur akan sangat rendah.

Program pembiayaan UMi lahir dari inisiatif DJPb dalam mendukung pemberdayaan UMKM di lapisan terbawah yang rentan dengan garis kemiskinan. Dengan hasil analisis yang menunjukkan dampak UMi bagi penurunan tingkat kemiskinan, maka upaya akselerasi dan peningkatan kualitas penyaluran UMi perlu menjadi perhatian besar bagi jajaran DJPb, selaku RCE. Hal yang bisa dilakukan antara lain mengajak pemda untuk turut berkontribusi dalam pendanaan dan subsidi bunga UMi, serta peningkatan kualitas survei yang dilaksanakan KPPN secara periodik.

## **6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN**

Hasil analisis pada kajian ini tidak menunjukkan hal yang bertolak belakang dengan teori secara umum. Semua variabel independen memiliki dampak signifikan, baik positif maupun negatif, terhadap tingkat kemiskinan. Namun implementasi kebijakan fiskal yang berada di bawah kontrol pemerintah, memberikan implikasi mengenai penguatan dampaknya bagi pencapaian tujuan bernegara. DJPb dan unit kerja vertikalnya yang diposisikan sebagai RCE harus mampu menjawab tantangan tersebut melalui peran mengawal akselerasi dan kualitas belanja pemerintah, penguatan survei dan monev KUR dan UMi agar memberikan dampak lebih optimal bagi UMKM dan *men-trigger* penurunan tingkat kemiskinan.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan, antara lain belum memasukkan beberapa variabel kebijakan fiskal, termasuk belanja pemerintah daerah melalui APBD. Belanja pemerintah per fungsi bisa jadi akan lebih memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fungsi yang memiliki dampak paling besar dalam penurunan tingkat kemiskinan. Disarankan untuk penelitian lanjutan memasukkan data dimaksud ke dalam model, sehingga akan memberikan gambaran riil dan arah kebijakan pengentasan kemiskinan. Penelitian yang melibatkan variabel KUR dan UMi pun masih dapat dipertajam dengan analisis dampak berdasarkan penyaluran per sektor sehingga dapat diketahui sektor yang memberikan kontribusi besar bagi penurunan tingkat kemiskinan.

## 7. REFERENSI

- A. Braverman & J.L. Guasch (1986). *Rural Credit Markets and Institutions in Developing Countries*.
- Antonio Antunes, T. Cavalcanti, A. Villamil (2011). *The Effects of Credit Subsidies on Development*.
- Badan Pusat Statistik (2022). *Tabel Dinamis*.
- Badan Pusat Statistik (2022). *Profil Kemiskinan di Sulawesi Selatan September 2021*.
- Bappenas (2018). *Kebijakan Keuangan Negara (Fiskal)*.
- Elisabete G.S.F. & Teresa F.B. (2019). *The impact of microcredit on poverty reduction in eleven developing countries in south-east Asia*.
- Gujarati, D (2003). *Basic Econometrics (Fourth Edition)*. McGraw Hill.
- Hendrawan Toni Taruno (2019). *Public Spending and Poverty Reduction in Indonesia: The Effects of Economic Growth and Public Spending on Poverty Reduction in Indonesia 2009-2018*.  
<https://doi.org/10.14710/ijpd.4.2.49-56>
- Hia, V.D.P, Handaka R.D & Zega Y.T. (2021). Pengaruh Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui pertumbuhan produksi industri mikro dan kecil.  
*Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(1), 75-84.
- Kementerian Keuangan (2022). *Program PEN Bantu Turunkan Jumlah Penduduk Miskin*.
- Kementerian Keuangan (2022). *APBN Kinerja dan Fakta (KiTA) Januari 2022*.
- Lian A. Yusuf & Sri Indriyani Dai (2020). *The Impact of Unemployment and Human Development Index on Poverty in Gorontalo Province 2008-2017*.  
*Jambura Equilibrium Journal (JEJ)* Volume 2. Issue 1. January 2020.
- Maria Ulfa & M. Mulyadi (2020). Analisis Dampak Kredit Usaha Rakyat pada Sektor Usaha Mikro terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar.
- Mark H. & Asmaa E. (2020). *Fiscal Policy: Taking and Giving Away*.  
<https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/fiscpol.htm>
- Miar & A. Yunani (2019). *The Analysis of Influence of The Government Expenditure on Poverty in Indonesia*.  
*Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol.18 No. 1.  
*Journal of Multinational Financial Management*, Volumes 52–53.
- N. Dahmardeh, M. & H. Tabar (2013). *Government Expenditures and its Impact on Poverty Reduction (Empirical From Sistan and Baluchestan Province of Iran)*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB.2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang

Sarwat Jahan, Ahmed S.M. & Chris Papageorgiou (2014). *What Is Keynesian Economics?*

<https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2014/09/basics.htm>

S.Fan, P. Hazell, S. Thorat (2000). *Government spending, growth and poverty in rural India.*

American journal of agricultural economics, 2000